

✓

**PERAN STAKEHOLDER DALAM PELESTARIAN PROGRAM P4K
(PROYEK PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI – NELAYAN KECIL)**



**Oleh
Edy Rianto**

Makalah



Provided by Diponegoro University Institutional Repository

[Metadata, citation and similar papers at c](#)

dalam Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang”

Pemalang, 1 Desember 2004.

**FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	1109 / 121 / FP / C / 1
Tgl.	12-10-05

PERAN STAKEHOLDER DALAM PELESTARIAN PROGRAM P4K (PROYEK PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI – NELAYAN KECIL)*

Oleh

Edy Rianto

Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Kemiskinan antara lain ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal dari golongan masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut keadaan dimana pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Menurut kriteria yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), kebutuhan minimum diukur dengan pengeluaran untuk makanan setara 2.100 kalori perkapita per hari, ditambah pengeluaran untuk kebutuhan non-makan yang meliputi perumahan, pakaian, barang tahan lama dan jasa. Kemiskinan relatif adalah keadaan dimana pendapatan seseorang atau sekelompok masyarakat lebih rendah daripada orang atau kelompok masyarakat lainnya., meskipun tingkat pendapatannya mungkin di atas garis kemiskinan.

Kemiskinan membawa banyak konsekuensi sosial, antara lain derajat kesehatan individu, kesehatan lingkungan, angka harapan hidup, pendidikan, kriminalitas dan lain-lain.

Program P4K

Pemerintah telah melaksanakan beberapa program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, baik di perdesaan maupun perkotaan. Program penanggulangan kemiskinan telah menjangkau seluruh pelosok tanah air dan menghasilkan banyak perkembangan positif. Namun demikian, masih banyak penduduk miskin yang belum dapat dientaskan dari belenggu kemiskinan. Hal ini antara lain disebabkan oleh banyak penduduk miskin dan terbatasnya kemampuan pemerintah.

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang sudah cukup lama dilaksanakan adalah Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K).

*) *Makalah* disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Strategi Pengembangan dan Pelestarian Program P4K dalam Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang”. Pemalang, 1 Desember 2004.

Proyek ini telah dilaksanakan sejak tahun 1979 dan direncanakan berakhir tahun 2005. Sasaran proyek ini adalah para petani dan nelayan kecil (PNK) miskin yang tinggal diperdesaan. Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem secara partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu keluarga miskin diperdesaan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Sistem ini dimaksudkan untuk memberlakukan suatu mekanisme yang mantap dan langgeng bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui penumbuhkembangan kelompok-kelompok swadaya yang berasal dari rumahtangga-rumahtangga miskin di perdesaan dan usaha-usaha mikro yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

Pendekatan yang diterapkan dalam pelaksanaan program P4K adalah pemberdayaan masyarakat. Anggota masyarakat miskin didorong untuk meningkatkan kemampuannya memperoleh penghasilan melalui usaha-usaha produktif, akses terhadap informasi, pasar dan lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

Program P4K dilaksanakan oleh tim manajemen P4K tingkat kabupaten, Petugas Pelaksana Tingkat Kabupaten (PPTK), Koordinator Penyuluh Pertanian (KPP), dan Penyuluh Pertanian (PP).

Pendampingan P4K

Sampai dengan tahun 2001, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan P4K, baik di tingkat pusat maupun daerah belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Masih banyak KPK (Kelompok Petani Kecil) yang belum mampu menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB) sendiri, masih lemah dalam pengembangan kelompok, dan belum mempunyai tabungan yang cukup berarti untuk memulai usaha. Hasil penelusuran pada tahun 2001 oleh Tim MTR IFAD menunjukkan bahwa 50% penguurus KPK dan 72% anggota KPK tidak mengetahui manfaat berorganisasi, manfaat tabungan, manfaat catatan, cara pengajuan kredit, dan pengembangan usaha.

Atas dasar temuan tersebut, Tim MTR merekomendasikan agar dilaksanakan penguatan KPK melalui mekanisme internal dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pelibatan LSM sebagai mitra kerja dalam pemberdayaan KPK dimulai pada tahun 2002 dan berlanjut dalam Pendampingan P4K tahun 2004. Tujuan Pendampingan P4K tahun 2004 adalah:

1. membantu manajemen P4K meningkatkan kemampuan PPTK, koordinator PP dan PP dalam pengelolaan teknis P4K yang mencakup aspek perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi, penguatan kapasitas KPK dan pengembangan usaha anggota KPK dan usaha bersama KPK. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan PPTK dan Koordinator.

2. meningkatkan kemampuan Koordinator PP dan PP dalam memfasilitasi penguatan kapasitas KPK.
3. meningkatkan kemampuan PPTK, koordinator PP dan PP dalam memfasilitasi pengembangan usaha anggota KPK dan Usaha Bersama KPK.

Melalui program ini pada gilirannya diharapkan masyarakat ekonomi lemah yang didampingi mampu meningkatkan pendapatan, mampu mengakses permodalan, mampu mengembangkan kelompok dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi.

Peran Stakeholders

Keberhasilan program P4K tidak dapat dilepaskan dari dukungan stakeholders, baik secara kelembagaan, sosial maupun keuangan. Di bidang kelembagaan, para anggota KPK yang notabene adalah para keluarga miskin mempunyai kemampuan organisasi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan secara terus-menerus agar KPK yang sudah terbentuk dapat terus berjalan dan aktif menjalankan fungsinya.

Pada umumnya para anggota KPK juga menghadapi kendala sosial dalam bergaul dengan masyarakat, karena pada umumnya masyarakat miskin secara psikologis biasanya menghadapi kompleks rendah diri, sehingga mereka tidak mampu secara penuh mengaktualisasikan diri mereka dalam pergaulan kemasyarakatan. Kondisi ini cukup rawan, karena perasaan rendah diri (inferior) ini bisa jadi menjadi penghalang utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Rencana Usaha Bersama yang disusun oleh KPK perlu mendapat dukungan keuangan dari lembaga keuangan yang ada. Paling tidak terdapat 2 persoalan yang potensial bagi KPK dalam hal keuangan. Pertama, sebagaimana dimaklumi bersama, lembaga keuangan pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan atas pinjaman (piutang) yang diberikan, sementara itu masyarakat miskin (dalam hal ini para anggota KPK) tidak memiliki harta yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai agunan. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya pihak yang bersedia menjadi penjamin

atas pinjaman yang diberikan kepada KPK. Kedua, anggota KPK pada umumnya memiliki kelemahan di bidang manajemen keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan kelompok.

Tahun 2005 menurut rencana adalah tahun terakhir pelaksanaan program P4K. Pertanyaannya, selepas tahun 2005 apakah yang akan terjadi dan dilakukan terhadap KPK yang sudah ada? Pertanyaan ini akan kembali pada pertanyaan dasar: perlukah KPK? Jika disepakati bahwa KPK berguna dan diperlukan oleh masyarakat (petani) miskin, maka KPK yang sudah ada (terbentuk) perlu dilestarikan dan aktivitasnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Lalu siapa yang akan membina KPK? Selama ini kegiatan program P4K diintegrasikan dengan tugas PP, sehingga para PP sudah sangat terbiasa dengan kegiatan KPK. Oleh karena itu, manajemen pembinaan KPK pasca program P4K seyogyanya juga tetap melibatkan institusi yang selama ini sudah terlibat secara aktif dalam pembinaan KPK. Dalam hal diperlukan adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam menjaga aktivitas pembinaan KPK, baik dalam hal dukungan institusional maupun dukungan finansial.

Di lapangan, peran perangkat desa juga tidak boleh diabaikan, karena mereka lah yang sehari-hari terlibat dalam pembinaan pengembangan kemampuan petani kecil. Para perangkat desa ini lah yang paling mengetahui karakteristik masyarakat setempat.

Penutup

Mengacu pada asas pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat didorong untuk mampu menolong dan mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka pola pembinaan pasca P4K hendaknya tidak harus diseragamkan, sehingga semua komponen masyarakat dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan aspirasinya.